

***Collaborative Governance* dalam Program Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Rw 01, Kelurahan Kandangan, Kota Surabaya**

Nandina Putri Shafiya¹, Rebecca Lorenzia Harsen², Yayuk Nur Arofah³, Veren Myvara⁴, Binti Azizatul Nafi'ah⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

¹²³⁴⁵Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

21041010242@student.upnjatim.ac.id¹

ABSTRACT

Violence against children in Indonesia is still a serious issue that requires deep attention. In addition to violence, the low welfare of adolescents is a serious challenge in Indonesia. Seeing the various problems experienced by children, especially at the local level, the Surabaya City Government, through the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB), launched the KAS-RPA (Kampung Arek Suroboyo Friendly to Women and Children) program. To optimize the implementation of the Kasrpa Program, active collaboration is needed between implementers, including the implementation of the Kasrpa Program implemented in the Kandangan RW 01 sub-district which won the General Champion "Best of the Best" in the KASRPA 2024 Pratama category. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. To measure the collaboration carried out using the collaborative governance theory by (Ansell & Gash, 2008). The results of the study indicate that Collaboration between implementers in terms of Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, and Collaboration Process has been implemented well.

Keywords: *child-friendly city; collaboration; KASRPA; protection of children and women*

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian mendalam. Selain kekerasan, rendahnya kesejahteraan remaja menjadi tantangan serius di Indonesia. Melihat berbagai permasalahan yang dialami anak khususnya di tingkat lokal, pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), meluncurkan program KAS-RPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Kasrpa diperlukan adanya kolaborasi yang aktif antarpelaksananya, tak terkecuali dengan pelaksanaan Program Kasrpa yang dilaksanakan di Kelurahan Kandangan RW 01 yang berhasil mendapatkan Juara Umum "Best of the Best" dalam kategori pratama KASRPA 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengukur kolaborasi yang dilakukan menggunakan teori *collaborative governance* oleh (Ansell & Gash, 2008). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya kolaborasi antarpelaksana dari segi Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Proses Kolaborasi telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: KASRPA; kolaborasi; kota layak anak; perlindungan anak dan perempuan

PENDAHULUAN

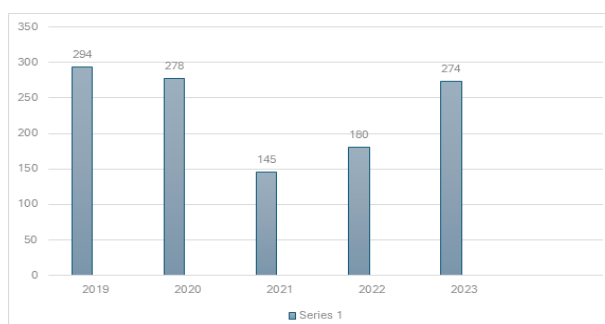
Kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian mendalam. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) KemenPPPA, sepanjang 2024 tercatat sebanyak 24.936 anak menjadi korban kekerasan. Masalah mengenai anak-anak yang masih terjadi di Indonesia di antaranya, kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, anak hidup di luar pengasuhan orang tua, kurangnya perlindungan anak dalam keadaan darurat, sistem keadilan untuk anak-anak, dan pernikahan anak (Yoshida et al., 2023). Tingginya angka kekerasan ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganannya. Ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum, layanan sosial, dan edukasi masyarakat menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga mengancam peluang mereka untuk berkembang dan berkontribusi bagi masa depan bangsa.

Selain kekerasan, rendahnya kesejahteraan remaja menjadi tantangan serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan mencapai 25,22% pada 2024, terutama di daerah perdesaan dan terpencil, hal ini menyebabkan banyak remaja tidak memiliki akses memadai terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, gizi, dan tempat tinggal yang layak. Ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan ini sering kali membuat remaja terpaksa bekerja di sektor informal atau terlibat dalam pekerjaan berisiko, yang mengancam kesehatan dan perkembangan mereka. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya akses terhadap layanan perlindungan sosial, seperti program bantuan pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Minimnya perlindungan sosial juga menyebabkan tingginya angka pernikahan dini, yang memperparah siklus kemiskinan dan mengurangi peluang remaja untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.

Melihat berbagai permasalahan yang dialami anak khususnya di tingkat lokal, pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), meluncurkan program KAS-RPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak). Program ini dibentuk sebagai respons terhadap tantangan perlindungan anak, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketimpangan akses terhadap layanan sosial. Langkah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Responsif Gender di Kota Surabaya. Program ini telah berjalan dari tahun 2015 yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak serta perempuan, dengan tujuan mewujudkan konsep Kota Layak Anak, di mana anak-anak dapat tumbuh dalam kondisi yang nyaman dan aman. Program KAS-RPA juga menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan hak yang setara bagi

perempuan dan anak-anak, khususnya di tingkat masyarakat yang paling dasar, yaitu kelurahan. Program ini memiliki lima indikator utama, yaitu Kampung Sehat, Kampung Asuh, Kampung Belajar, Kampung Aman, dan Kampung Inovatif & Kreatif, yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak. Program ini dijalankan secara berkelanjutan di 29 kecamatan di Surabaya, dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan di tingkat kelurahan dan kecamatan agar lebih responsif dalam menangani masalah yang melibatkan perempuan dan anak. Dengan melibatkan masyarakat setempat, program ini berfokus pada pemberian pendampingan dan menciptakan ruang bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang layak.

Program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memberikan pendampingan dan dukungan berkelanjutan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Keberhasilan KAS-RPA juga terlihat dari pengakuan internasional, di mana Surabaya terpilih sebagai kota pertama di Indonesia yang menjadi pilot program Child Friendly Cities Initiative (CFCI), yang memiliki potensi besar untuk menjadi Kota Layak Anak Tingkat Dunia dengan standar internasional (dikutip dari bacasaja.id). Meskipun Kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan kota layak anak, hal ini tidak serta merta dapat menurunkan jumlah kasus kekerasan kepada anak di Kota Surabaya. Berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada Tahun 2024 jumlah kasus kekerasan anak di Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 1.232 kasus menjadi 956 kasus di tahun 2024, yang di mana Surabaya menjadi kota yang banyak pelaporan kekerasan kepada anak yang mencapai 156 kasus per November 2024. Surabaya dikenal sebagai wilayah metropolitan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi setiap tahunnya dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Kondisi ini bahkan sering disoroti oleh berbagai media yang menyebut Surabaya dalam kondisi darurat kekerasan seksual dan anak. Hal ini diperkuat oleh data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan angka kekerasan terhadap anak di Surabaya yang dilaporkan selama lima tahun terakhir.



Gambar 1. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di kota Surabaya tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024

Pada grafik tersebut menampilkan naik turunnya angka kasus kekerasan kepada anak yang terlapor di Kota Surabaya. Namun kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian dari (Asy'ary, 2021) dalam (Andriani & Prianto, 2024) bahwasanya di lapangan masih banyak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang tidak dilaporkan. Kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi karena perilaku salah yang dilakukan orang tua, pengasuh, dan lingkungan. Karena hal ini diperlukan adanya upaya kolaboratif antaraktor pada pelaksanaan program. Keberhasilan program KASRPA sangat bergantung pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor yang terlibat, baik pemerintah, aktor lokal, maupun organisasi lainnya. Kolaborasi Pentingnya kolaborasi ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Telussa et al., 2024) terkait penanganan kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Timur yang melibatkan beberapa aktor di dalamnya, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kolaborasi antara Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menangani kasus kekerasan anak adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan optimal bagi korban. Dalam konteks ini, KASRPA mengadopsi pendekatan serupa dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan implementasi program, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mewujudkan lingkungan ramah anak-anak dan perempuan di Surabaya.

Program KASRPA ini dilaksanakan di 786 RW, yang turut memperkuat inisiatif kota dalam menyediakan layanan dan pembangunan yang inklusif. Berbagai pencapaian ini mendorong Surabaya untuk terus bergerak menuju kota yang layak anak dan perempuan, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan yang responsif terhadap gender dan perlindungan anak. Keberhasilan program KASRPA ini juga tercermin dari pemberian penghargaan kepada kampung-kampung yang berhasil menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Penghargaan ini meliputi kategori Pratama, Madya, dan penghargaan tertinggi berupa Best of The Best (Juara Umum), yang dibedakan berdasarkan lima kategori: Kampung Sehat, Kampung Asuh, Kampung Belajar, Kampung Aman, serta Kampung Inovatif & Kreatif.

Berdasarkan Fakta di lapangan telah pada tanggal 13 September 2024 telah diadakan Acara Penganugerahan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam Acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada beberapa kampung yang mendapatkan penghargaan Utama dan Madya KAS-RPA 2024, salah satunya yakni penghargaan yang didapat oleh RW 01 Kelurahan Kandangan sebagai juara umum atau *Best of The Best* dalam Lomba Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak Kategori Utama. Keberhasilan Kelurahan Kandangan ini tidak lepas dari pencapaian luar biasa dalam beberapa subprogram KAS-RPA, antara lain Juara 1 untuk Kampung Asuh, Kampung Kreatif, dan Kampung Belajar, serta Juara 2 untuk Kampung Sehat dan Kampung Aman. Pencapaian ini mencerminkan upaya Kelurahan Kandangan dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap gender, sesuai dengan tujuan program KAS-RPA, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak. Selain itu, penghargaan ini menegaskan bahwa keberhasilan program KAS-RPA tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh peran aktif seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama.

Penghargaan yang diterima oleh Kelurahan Kandangan RW 01 sebagai juara umum Best of The Best dalam pelaksanaan KAS-RPA 2024 menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam proses kolaborasi antaraktor. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada peran pemerintah kota, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif dari masyarakat setempat dan aktor lokal seperti RT, KSH, PKK, Dashawisama dan Tenaga Pendidik. Kolaborasi yang solid di tingkat RW 01 tercermin dari sinergi yang terjalin antara pengurus RW, lembaga terkait, serta warga yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak. Proses kolaborasi ini dilaksanakan melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan sikap saling memahami. Pentingnya komunikasi dua arah yang intensif, pembagian tugas yang jelas, serta pengambilan keputusan secara kolektif memperkuat keberhasilan ini. Dengan pencapaian tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa aktor dalam Pelaksanaan program KASRPA di Kelurahan Kandangan RW 01, sehingga mereka berhasil mendapatkan Juara Umum Pada KASRPA 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metodologi kualitatif. Lokasi penelitian berada di RW 01, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kolaborasi antarberbagai partisipan dalam proses tersebut. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari total delapan informan, dengan menggunakan strategi *purposive sampling* pada beberapa aspek. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alat penelitian yang digunakan terdiri dari Panduan Wawancara dan Catatan Lapangan. Metodologi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyusunan simpulan atau verifikasi. Selain itu, kebenaran data dipastikan melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan mengenai Program KASRPPA telah berhasil dilaksanakan secara rutin pada setiap indikator kampung. Dalam penelitian ini pihak pemerintah yang terlibat adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, dari pihak swasta yaitu akademisi yang membantu proses evaluasi, dan perwakilan dari pihak Masyarakat yaitu RW dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Kolaborasi antaraktor tersebut menjadi fokus utama pada penelitian ini yang menggunakan teori *Collaborative Governance* dari (Ansell & Gash, 2008). Proses kolaborasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan bagian penting dalam memulai keberlangsungan suatu proses kolaborasi. Kondisi ini dapat berfungsi sebagai faktor pendorong maupun penghambat yang memengaruhi terjadinya kolaborasi antara pemangku kepentingan dan lembaga/organisasi terkait. Menurut model *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, kondisi awal (*starting condition*) merupakan langkah pertama dalam mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berupaya menciptakan kota layak anak melalui program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KASRPPA). Program ini muncul sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak mereka. Dalam menjalankan program tersebut, Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat melaksanakan tugas tersebut secara mandiri, melainkan membutuhkan dukungan jejaring yang terdiri dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DP3APPKB memutuskan untuk menggandeng pihak swasta serta pihak Masyarakat yang terdiri atas perwakilan kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk mewujudkan kota yang layak bagi anak dan perempuan, bukan hanya sebagai bentuk penilaian, tetapi juga sebagai program yang berkelanjutan.

Kondisi awal di RW 01, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo terjalin dengan baik diawali dengan pembentukan komunikasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh DP3APPKB kepada perwakilan masyarakat setempat. Selanjutnya, pihak Kecamatan Benowo dan Kelurahan Kandangan memilih RW 01 untuk diikutsertakan dalam lomba sebagai representasi wilayah tersebut. Selain itu, aktor lain yang terlibat yaitu Kader Surabaya Hebat (KSH) di wilayah Kelurahan Kandangan, yang berperan sebagai penggerak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kesuksesan program tersebut. Dalam menjalankan program tersebut, RW 01, Kelurahan Kandangan juga melibatkan pihak swasta yakni pihak akademisi yang memberikan bantuan dalam penyusunan portofolio setiap RT, sekaligus berperan sebagai evaluator. Proses kolaborasi ini telah memberikan manfaat bagi semua aktor yang terlibat, karena masing-masing pihak saling mendukung dan membantu dalam penanganan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah RW 01, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum memulai proses kolaborasi melalui program KASRPPA, semua aktor yang terlibat telah memiliki kesadaran penuh akan peran mereka, sehingga membentuk tingkat kepercayaan dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan kolaborasi ini.

b. Desain Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KASRPPA) di RW 01, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo ini dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Struktur kelembagaan dibentuk melalui forum yang melibatkan perangkat kelurahan, pengurus RW/RT, kader, kelompok perempuan, dan tokoh masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pengambilan keputusan bersama.

Pendekatan kelembagaan berbasis komunitas yang diterapkan dalam program ini efektif dalam memanfaatkan kearifan lokal dan memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap program. Proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Selain itu, pengelolaan sumber daya lokal, seperti dana swadaya masyarakat dan pemanfaatan ruang publik, menunjukkan bahwa program ini mampu memaksimalkan potensi lokal untuk mendukung keberlanjutan program.

Kelembagaan program ini mengutamakan inklusivitas dengan memberikan peran aktif kepada warga, terutama perempuan dan anak, dalam menyusun dan menjalankan kegiatan. Pemerintah kelurahan bertindak sebagai fasilitator utama, memastikan dukungan regulasi dan penyediaan sumber daya. Sementara itu, masyarakat, khususnya kelompok perempuan, memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan anak, dan pengelolaan fasilitas publik yang ramah perempuan dan anak.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif dengan peran yang jelas bagi setiap aktor. Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), bertindak sebagai pengarah utama dengan menyediakan panduan teknis, pelatihan, dan supervisi secara berkala. Di tingkat lokal, Kelurahan Kandangan dan RW 01 bertanggung jawab mengelola koordinasi, menyediakan data terkait progres program, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah kota. Selain itu, masyarakat, khususnya kader KASRPPA, berperan aktif dalam memantau pelaksanaan program di lapangan dan melaporkan capaian serta kendala yang dihadapi.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan kolaborasi dalam sebuah program. Dalam implementasi program KASRPPA di Kelurahan Kandangan, kepemimpinan fasilitatif terbukti menjadi pilar utama yang mendukung keberhasilan kolaborasi yang efektif. Pemimpin tidak hanya bertindak sebagai pengarah, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan proses komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak berjalan lancar. DP3AKB, sebagai pengarah

utama, memegang peran sentral dengan memberikan panduan teknis, pelatihan, serta monitoring berkala untuk memastikan semua elemen program memahami perannya dan berkontribusi secara optimal.

Pihak RW 01 di Kelurahan Kandangan memainkan peran utama dalam keberhasilan program KASRPA melalui penerapan kepemimpinan fasilitatif di tingkat lokal. Dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, Ketua RW 01 tidak hanya mengawasi jalannya program, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator. Beliau memberikan dukungan nyata, memotivasi warga, serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan. Pendekatan ini menciptakan keadaan yang partisipatif, sehingga masyarakat dapat berkontribusi secara maksimal dalam program ini.

Kader Surabaya Hebat (KSH) turut menjadi aktor utama dalam mendukung keberhasilan program. Mereka secara aktif melakukan sosialisasi, pendampingan, dan membantu menyelesaikan berbagai kendala yang muncul di lapangan. Selain itu, KSH memastikan setiap masyarakat memahami tujuan program dan terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Melalui koordinasi yang baik, KSH menciptakan lingkungan kolaboratif yang memungkinkan program berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

Kolaborasi yang erat antara DP3AKB, Ketua RW 01, dan KSH menjadi kunci utama dalam menciptakan kerja sama yang solid. Kolaborasi yang terjalin memungkinkan program KASRPA berjalan lancar, efektif, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan fasilitatif yang diterapkan oleh berbagai pihak berhasil membangun kepercayaan, mempererat hubungan antarpemangku kepentingan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat di setiap tahapannya. Pendekatan ini juga menciptakan suasana yang kondusif, memperkuat kolaborasi, dan memastikan keberlanjutan program untuk mencapai hasil yang maksimal.

d. Proses Kolaborasi

Dalam proses ini terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan proses kolaborasi, sebagai berikut:

1. Dialog Tatap Muka

Dalam Pelaksanaan Kolaborasi antarpelaksana (Pihak RW, KSH, RT, Tenaga Pendidik) telah dilaksanakan dialog tatap muka yang telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat karena selama pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan, dialog tatap muka dilakukan sebanyak 4 Kali dalam Satu Minggu. Hal ini dilaksanakan agar para pelaksana memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan kegiatan, yang di mana dalam pelaksanaan pertemuan tersebut para pelaksana dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat ataupun keluhan kesahnya selama melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, Ketua RW 01 dapat menilai kemajuan program, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta menilai potensi perbaikannya di masa mendatang. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi acuan bagi program selanjutnya. Dengan demikian, hal ini

sesuai dengan teori dialog tatap muka yang menyatakan bahwa untuk memperoleh kondisi yang saling menguntungkan, perlu dilakukan identifikasi peluang untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama.

2. Membangun Kepercayaan

Proses kolaborasi tidak hanya berupa negosiasi, tetapi juga melibatkan terjalannya kepercayaan antarpelaku kolaborasi. Para pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini memahami peran masing-masing dalam pelaksanaan indikator membangun kepercayaan. Hal ini terlihat dalam wawancara dengan koordinator KSH (Kader Surabaya Hebat). Para pelaksana telah menjalankan tanggung jawab/perannya masing-masing, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemaparannya. Kepercayaan masing-masing pelaksana dalam kegiatan KASRPA dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi rutin dan komunikasi yang efektif antarpelaksana. Lebih lanjut, upaya kolaboratif para pelaku untuk membangun kepercayaan terlihat dari hasil dan tantangan yang berhasil diatasi, serta hasil dan proses kolaborasi yang positif, terbukti dengan kemenangan mereka sebagai juara umum KASRPA terbaik tahun 2024. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan indikator membangun kepercayaan yang harus dapat dibangun oleh para pemimpin kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Hal ini akan meredakan kekhawatiran para pelaksana bahwa kolaborasi yang telah dilakukan telah membawa hasil yang baik, karena berdampak positif terhadap fondasi kolaborasi.

3. Komitmen pada Proses

Menyadari bahwa para pelaksana program saling bergantung dan mengandalkan satu sama lain untuk memecahkan tantangan saat ini menumbuhkan komitmen terhadap proses, yang pada gilirannya memastikan bahwa proses kerja sama selalu menciptakan keberlanjutan. Akibatnya, hal ini sejalan dengan indikator komitmen proses, yang memperkirakan bahwa motivasi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi akan diperkuat dengan adanya kondisi yang sangat saling bergantung.

4. Sikap saling Memahami

Pada tahap saling memahami, para pelaksana harus menetapkan tujuan dan misi yang jelas untuk menumbuhkan pemahaman bersama. Metode tata kelola kolaboratif hanya dapat dilakukan jika semua pihak sepakat. Dengan adanya saling pengertian antarpelaku, maka akan diperoleh pemahaman tentang manfaat apa saja yang akan diperoleh jika program KASRPA dijalankan, dan informasi tentang pelaksanaan kompetisi KASRPA tahun 2024 telah diberikan untuk membangkitkan semangat para pelaksana. Dengan demikian, kemitraan yang terjalin bersifat jangka panjang dan konsisten, sehingga kepercayaan dan kerja

sama dapat tumbuh subur. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan penanda adanya sikap saling memahami yaitu adanya tujuan bersama yang jelas, karakter bersama yang berbeda dengan hambatan yang dihadapi.

5. Hasil Kolaborasi

Hasil dari kolaborasi yang optimal ini yakni kelurahan Kandangan RW 01 berhasil mendapatkan juara umum *best of the best* pelaksanaan KASRPA 2024 karena berhasil menggaet beberapa juara dalam kategori kampung yang ada di program KASRPA yakni Juara 1 Kampung Asuh, Juara 1 Kampung Kreatif, Juara 1 Kmapung Belajar, Juara 2 Kampung Sehat, dan Juara 2 Kampung Aman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian tentang *collaborative governance* pada Program Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KASRPPA) di RW 01, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, menunjukkan bahwa penerapan teori *collaborative governance* dengan variabel kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi memainkan peran signifikan dalam keberhasilan program.

a) Kondisi Awal

Program KASRPPA dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan peduli anak, yang merupakan bagian dari komitmen Kota Surabaya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kondisi sosial masyarakat yang majemuk, serta adanya dukungan kebijakan pemerintah, menjadi pondasi awal yang mendukung kolaborasi ini.

b) Desain Kelembagaan

Struktur kelembagaan dalam program ini mencakup peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kelurahan Kandangan, kader KASRPPA, dan organisasi mitra. Kolaborasi ini didukung oleh panduan teknis, pelatihan, serta forum komunikasi rutin. Desain kelembagaan yang inklusif memungkinkan semua aktor memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi, sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif.

c) Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan dalam program ini ditandai dengan gaya yang partisipatif dan inklusif, di mana pemimpin lokal seperti pengurus RW dan kelurahan berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini menciptakan suasana yang kondusif untuk membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan.

d) Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi pada program KASRPPA di RW 01 melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, sikap saling

memahami, dan hasil kolaborasi perlunya melaku komunikasi dua arah yang intensif, pembagian tugas yang jelas, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Pertemuan dan pelaporan rutin memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal diatasi melalui pelatihan dan kampanye kesadaran publik. Sehingga hal tersebut dapat membangun tujuan bersama yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, *collaborative governance* dalam Program KASRPA telah berhasil menciptakan mekanisme kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan mitra organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teori *collaborative governance* mampu mendukung tercapainya tujuan program secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan ini memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi dalam desain kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang berkesinambungan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Saran

- a. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi kader dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya isu perlindungan perempuan dan anak, serta kemampuan teknis dalam menjalankan program.
- b. Evaluasi Berkelanjutan
Evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan peluang perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Anggito, J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Ametilok, M. P. P., Rachmawati Novaria, R., & Susiantoro, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 1(3).
- Andriani, P. D., & Prianto, A. (2024). Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Program Puspaga Balai Rw Upaya Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 7(3), 1029-1040.
- Annisa Rizky Fadilla, P. A. W. (2023). *Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. Mitita Jurnal Penelitian.*
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance*. In *Collaborative Governance dalam Perspektif Publik.*
- Bila Aziza, B. S. (2019). *Collaborative Governance dalam Pemerintahan. Jurnal Transformasi Administrasi*, 09, 196-210.
- Esariti, L., Fauziah, F., & Artiningsih, A. (2020). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hunian pada Program Bantuan

- Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Semarang. *Jurnal Perumahan*, 15(2), 107.
- Fitrah, M. (2018). Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus.
- Irawan, D. (2017). *Collaborative Governance* (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Mokaliran, E. V., Massie, C. D., & Waha, C. J. (2023). Implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(2), 208-220.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Cakra Books 1(1).
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., & Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviu Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995- 1010.
- Sugiyono. (2018). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. 456.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Telussa, Y. A., Rahmadanik, D., & Widiyanto, M. K. (2024). *Collaborative Governance* Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Timur. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 83-92. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1306>
- Virgianita, A., Anggitta, M., Dara, A. T., Yuliestiana, Amalia, A. D., Saputro, B. A. P., & Widayawari, R. D. A. (2021). Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045.
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Tujuan 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153-166.